BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama, suku, budaya, dan identitas sosial yang sangat tinggi. Keragaman ini merupakan fondasi historis bangsa Indonesia, sekaligus menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dari banyak negara lain. Namun, dalam praktik sosial dan politik kontemporer, keragaman tersebut dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan bijak. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan menunjukkan adanya peningkatan fenomena intoleransi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, serta radikalisme berbasis agama. Setara Institute mencatat bahwa jumlah insiden pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan meningkat dari 175 insiden pada tahun 2022 menjadi 260 insiden pada tahun 2024, dengan total 402 tindakan pelanggaran. Data ini menegaskan bahwa persoalan keberagaman keagamaan telah menjadi tantangan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena intoleransi tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin masif. Media sosial kerap digunakan sebagai ruang penyebaran ide-ide ekstrem, potongan ceramah provokatif, serta komentar yang menyerang identitas kelompok lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga

berpotensi memperkuat polarisasi sosial apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan pemahaman keagamaan yang moderat. Dengan demikian, persoalan keberagaman keagamaan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarumat beragama, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi yang saling berkaitan.

Kompleksitas persoalan tersebut mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan penanganan konflik setelah terjadi, tetapi juga membangun kebijakan yang bersifat preventif dan promotif. Pemerintah membutuhkan suatu pendekatan yang dapat membentuk cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pengamalan ajaran agama dengan komitmen terhadap kehidupan kebangsaan, penghormatan terhadap perbedaan, penolakan terhadap kekerasan, serta penerimaan terhadap budaya lokal. Dalam konteks inilah Moderasi Beragama ditempatkan sebagai salah satu pendekatan kebijakan untuk merespons tantangan keberagaman tersebut. Moderasi Beragama tidak dimaksudkan sebagai upaya mereduksi ajaran agama, melainkan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menghindarkan individu maupun kelompok dari sikap ekstrem, intoleran, dan kekerasan, sekaligus mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

Penempatan Moderasi Beragama dalam agenda kebijakan nasional tidak terlepas dari kebutuhan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kehidupan beragama yang moderat,

meningkatkan toleransi dan kerukunan, memperkuat komitmen kebangsaan, mencegah kekerasan atas nama agama, serta membangun penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal. Dengan karakter persoalan yang bersifat lintas sektor tersebut, penguatan Moderasi Beragama tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian atau lembaga, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat secara luas.

Komitmen pemerintah terhadap penguatan Moderasi Beragama telah ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menempatkannya sebagai bagian dari agenda pembangunan bidang agama dan kebudayaan. Namun, pada tahap awal, penguatan Moderasi Beragama masih menghadapi keterbatasan karena belum sepenuhnya didukung oleh kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaannya secara lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan landasan kebijakan yang lebih kuat agar penguatan Moderasi Beragama tidak berhenti sebagai program sektoral, tetapi dapat diimplementasikan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Penguatan tersebut kemudian diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam menempatkan Moderasi Beragama sebagai kebijakan publik nasional. Perpres tersebut menegaskan bahwa Moderasi Beragama merupakan modal dasar bagi keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, regulasi ini memberikan arah yang lebih jelas mengenai tujuan, sasaran, strategi, penyelenggaraan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penguatan Moderasi Beragama. Dengan demikian, kehadiran Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tidak hanya memberikan legitimasi normatif, tetapi juga memperkuat posisi Moderasi Beragama sebagai agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

Sebagai kebijakan publik nasional, implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023 menuntut keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kementerian Agama memiliki posisi penting dalam penguatan kebijakan tersebut melalui fungsi koordinasi dan pelaksanaan berbagai program Moderasi Beragama. Implementasi kebijakan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan aparatur pemerintah, pendidik, tokoh agama, komunitas, lembaga pendidikan, serta kelompok strategis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Moderasi Beragama tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang mampu menghasilkan perubahan pada sasaran kebijakan.

Dalam struktur Kementerian Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan Moderasi Beragama, khususnya di wilayah kerja Indonesia Timur. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar melaksanakan berbagai kegiatan penelitian, pengembangan model, diseminasi, pelatihan, serta fasilitasi kebijakan yang berkaitan dengan penguatan Moderasi Beragama. Berbagai

program tersebut pada dasarnya merupakan bentuk implementasi kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pemahaman, sikap, dan kapasitas peserta atau alumni dalam menginternalisasi nilai-nilai Moderasi Beragama.

Salah satu kegiatan utama adalah Sekolah Penguatan Moderasi Beragama, yang dirancang dengan kurikulum dan modul yang sistematis untuk memperkuat pemahaman, sikap, serta kapasitas alumni dalam menginternalisasi nilai-nilai Moderasi Beragama. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat menjangkau alumni dari berbagai latar belakang.

Selain itu, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar juga menyelenggarakan *Short Course* Moderasi Beragama yang ditujukan bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas para pendidik sebagai agen Moderasi Beragama sehingga mereka dapat berperan dalam menyebarluaskan nilai-nilai moderasi di lingkungan pendidikan. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan lain seperti seminar, *workshop*, diskusi, *focus group discussion* (FGD), sosialisasi, bedah buku, dan *talkshow* juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mengarusutamakan Moderasi Beragama melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif.

Beragamnya bentuk program tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penguatan Moderasi Beragama telah diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan dengan sasaran, metode, dan

karakteristik yang berbeda. Namun, keberadaan berbagai program dan tingginya jumlah peserta belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari aspek *output*, seperti jumlah kegiatan, jumlah peserta, atau terlaksananya program, tetapi juga perlu dilihat dari *outcome*, yaitu perubahan atau manfaat yang dihasilkan setelah kebijakan diimplementasikan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana berbagai program penguatan Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mampu menghasilkan perubahan pada sasaran program, khususnya dalam pemahaman terhadap nilai-nilai Moderasi Beragama.

Evaluasi terhadap *outcome* menjadi semakin penting karena tujuan penguatan Moderasi Beragama pada akhirnya tidak sekadar memastikan bahwa program terlaksana, tetapi memastikan bahwa nilai-nilai yang disampaikan dapat dipahami dan diinternalisasi oleh peserta atau alumni. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tersebut dilihat melalui empat indikator Moderasi Beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya diarahkan untuk mengetahui apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga untuk melihat sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap pemahaman alumni atas keempat indikator tersebut.

Pada tahun 2025, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar melaksanakan berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dengan beragam bentuk dan sasaran. Tingginya intensitas kegiatan tersebut menunjukkan implementasi kebijakan yang aktif, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. Rekap Kegiatan Moderasi Beragama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025

NO	Jenis Kegiatan Moderasi Beragama	Jumlah Pelaksanaan	JP	Total JP Kegiatan	Audience
1	Sekolah Penguatan Moderasi Beragama	1 kegiatan	48	48	Masyarakat
2	*Moving Class* Moderasi Beragama	12 kegiatan	2	24	Sekolah
3	*Visiting Class* Moderasi Beragama	13 kegiatan	2	26	Universitas
4	*Short Course* Moderasi Beragama	5 kegiatan	16	80	Pendidikan
5	Klinik Moderasi Beragama	8 kegiatan	3	24	Komunitas
6	Sarasehan Moderasi Beragama	9 Kegiatan	5	45	Masyarakat dan Komunitas
7	Sosialisasi Moderasi Beragama	5 kegiatan	3	15	Masyarakat dan Komunitas
8	Bedah buku Moderasi Beragama	2 kegiatan	4	8	Masyarakat dan Komunitas
9	Kelas Intensif Semiotika Moderasi Beragama	1 kegiatan	14	14	Masyarakat
10	Moderasi Beragama *Road to Campus*	3 kegiatan	2	6	Universitas
11	Penguatan Literasi Moderasi Beragama	5 Kegiatan	4	20	Komunitas
12	Alumni Sekolah Moderasi Beragama	1 Kegiatan	2	2	Sekolah
Total		**65 Kegiatan**	**105**	**312**	

Ket : JP = Jam Pelajaran

Tabel 1 memperlihatkan ragam kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sepanjang tahun 2025. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk, mulai dari sekolah penguatan, *Moving Class*, *Visiting Class*, *Short Course*, klinik, sosialisasi, bedah buku, kelas intensif semiotika, hingga program *Road to*

Campus dan penguatan literasi. Variasi kegiatan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama diimplementasikan melalui pendekatan yang inklusif, dengan melibatkan masyarakat umum, komunitas, sekolah, perguruan tinggi, hingga pegawai internal.

Keberagaman bentuk kegiatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran. Perbedaan bentuk, durasi, serta sasaran kegiatan juga menunjukkan adanya upaya memperluas jangkauan kebijakan kepada berbagai kelompok masyarakat. Namun demikian, tingginya jumlah dan variasi kegiatan belum sepenuhnya dapat menggambarkan keberhasilan kebijakan, karena pelaksanaan kegiatan pada dasarnya baru menunjukkan capaian pada aspek *output*. Untuk mengetahui keberhasilan yang lebih substantif, diperlukan informasi mengenai kelompok yang dijangkau serta manfaat dan perubahan yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan.

Namun, untuk melihat gambaran besar secara lebih komprehensif, diperlukan rekapitulasi total kegiatan yang tidak hanya menyoroti jenis kegiatan, tetapi juga jumlah alumni, distribusi berdasarkan jenis kelamin, latar belakang agama, serta status kepegawaian. Ringkasan ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan moderasi beragama benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang beragam.

Oleh karena itu, Tabel 2 berikut disajikan sebagai rekap total kegiatan moderasi beragama tahun 2025, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai intensitas pelaksanaan dan cakupan alumni.

Tabel 2. Rekapitulasi Kegiatan Moderasi Beragama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

NO	Jenis Kegiatan MB	Jumlah Alumni	Jenis Kelamin		Agama						Status Kepegawaian		
			L	P	Isl	Kri	Kat	Hin	Bud	PK	AK	ANK	NA
1	Sekolah Penguatan Moderasi Beragama	30	21	9	25	5	0	0	0	0	2	3	25
2	*Moving Class* Moderasi Beragama	442	212	230	324	96	21	2	0	0	0	0	442
3	*Visiting Class* Moderasi Beragama	507	137	370	281	195	23	0	8	0	0	0	507
4	*Short Course* Moderasi Beragama	174	81	93	127	38	2	7	0	0	6	3	165
5	Klinik Moderasi Beragama	160	55	105	115	9	1	14	19	2	12	3	145
6	Sarasehan Moderasi Beragama	345	254	91	243	19	7	7	2	0	71	52	222
7	Sosialisasi Moderasi Beragama	221	119	102	33	2	2	0	0	0	90	42	139
8	Bedah buku Moderasi Beragama	140	93	47	134	3	1	1	1	0	48	12	80
9	Kelas Intensif Semiotika Moderasi Beragama	31	23	8	28	3	0	0	0	0	8	3	20
10	Moderasi Beragama *Road to Campus*	500	180	320	350	150	0	0	0	0	1	0	499
11	Penguatan Literasi Moderasi Beragama	210	100	110	199	6	3	1	1	0	141	20	49
12	Alumni Sekolah Moderasi Beragama	50	20	30	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Jumlah		2810	1295	1515	1909	526	60	32	31	2	379	138	2343

Ket : MB = Moderasi Beragama; L = Laki-laki; P = Perempuan; Isl = Islam; Kri = Kristen; Kat = Katolik; Hin = Hindu; Bud = Buddha; PK = Penghayat Kepercayaan; AK = ASN Kementerian Agama; ANK = ASN Non-Kementerian Agama; NA = Non-ASN.

Tabel 2 memperlihatkan rekapitulasi kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sepanjang tahun 2025. Jumlah alumni yang terlibat mencapai 2.810 orang dengan latar belakang yang beragam, baik dari sisi jenis kelamin, agama, maupun status kepegawaian. Ragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi *Moving Class*, *Visiting Class*, Klinik Moderasi Beragama, Sarasehan, *Shortcourse*, Sosialisasi, Sekolah Penguatan Moderasi, Bedah Buku, Kelas Intensif Semiotika, *Road to Campus*, Penguatan Literasi, hingga Alumni Sekolah Moderasi Beragama. Pelaksanaan kegiatan yang padat ini menjadi bukti bahwa kebijakan moderasi beragama sebagaimana diamanatkan oleh Perpres No. 58 Tahun 2023 telah dijalankan secara nyata dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Meskipun capaian kuantitatif tersebut menunjukkan keberhasilan dari sisi implementasi, penelitian ini menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap pemahaman alumni. Hal yang penting untuk ditelusuri adalah sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan benar-benar efektif dalam meningkatkan pemahaman alumni terhadap empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan keterbukaan terhadap budaya lokal. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan dan jumlah alumni yang terlibat, tetapi juga dari kualitas pemahaman yang terbentuk pada alumni setelah mengikuti kegiatan.

Menurut teori kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau jumlah

alumni yang terlibat, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan perubahan pemahaman dan perilaku sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2018:429) bahwa keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tahapan *input, process, output, dan outcome*. *Input* berupa regulasi dan sumber daya, *process* berupa pelaksanaan kegiatan, *output* berupa jumlah kegiatan dan alumni, sedangkan *outcome* berupa pemahaman alumni terhadap empat indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan keterbukaan terhadap budaya lokal.

Untuk melihat posisi penelitian ini, perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, ditemukan 3 antara lain sebagai berikut:

1. Maizuddin, Dedy Sumardi, dan Zulihafnani pada Program Magister PTKIN Aceh tahun 2023 dengan judul *"Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama pada PTKIN Aceh."* Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk menggambarkan implementasi kebijakan moderasi beragama pada empat PTKIN di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama telah dirumuskan dengan baik, tetapi implementasinya terkendala minimnya kapasitas SDM pelaksana, perbedaan pemahaman aparatur, serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas implementasi kebijakan

moderasi beragama, meskipun tidak menyinggung persoalan efektivitas kegiatan terhadap pemahaman alumni sebagaimana menjadi fokus penelitian di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

2. Muhammad Nur Rofik pada Program Sarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dengan judul *"Implementasi Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah."* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah-sekolah binaan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berlangsung melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan guru, serta integrasi materi moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan jumlah penyuluh agama dan fasilitator yang tidak sebanding dengan banyaknya sekolah yang harus didampingi. Penelitian ini relevan karena sama-sama menyoroti implementasi kebijakan moderasi beragama, tetapi belum menilai sejauh mana alumni memahami indikator moderasi beragama sebagaimana menjadi fokus penelitian ini.
3. Ainul Migdad pada Program Sarjana IAIN Ambon tahun 2022 dengan judul *"Implementasi Program Penguatan Moderasi Beragama di*

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk menggambarkan implementasi program penguatan moderasi beragama di Kanwil Kemenag Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan moderasi beragama cukup baik melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat, tetapi masih terkendala jumlah SDM yang terbatas, kurang meratanya pemahaman aparatur terhadap moderasi beragama, serta minimnya pelatihan lanjutan bagi tenaga pendidik. Penelitian ini relevan karena sama-sama menyoroti implementasi kebijakan moderasi beragama, meskipun konteksnya berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus mengevaluasi efektivitas kegiatan moderasi beragama terhadap pemahaman alumni di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dan program moderasi beragama telah dikaji dalam berbagai konteks kelembagaan, baik di perguruan tinggi, sekolah, maupun kantor wilayah Kementerian Agama. Ketiga penelitian tersebut juga menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti keterbatasan kapasitas SDM, perbedaan pemahaman pelaksana, koordinasi yang belum optimal, serta keterbatasan fasilitator dalam menjangkau sasaran program. Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih berfokus pada proses pelaksanaan program dan berbagai kendala implementasinya.

Berangkat dari hasil telaah penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu ditelusuri lebih mendalam. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah sejauh mana alumni kegiatan moderasi beragama benar-benar memahami dan menginternalisasi substansi kebijakan, khususnya indikator moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan moderasi beragama pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, yang memiliki intensitas pelaksanaan kegiatan cukup tinggi dan menjangkau ribuan alumni setiap tahunnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dengan sasaran yang beragam. Tingginya jumlah dan intensitas kegiatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya perlu dilihat dari sisi banyaknya kegiatan yang berhasil dilaksanakan, tetapi juga perlu ditelaah sejauh mana kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, persoalan yang belum banyak dikaji adalah apakah tingginya intensitas pelaksanaan kegiatan moderasi beragama telah diikuti oleh efektivitas dalam meningkatkan pemahaman alumni terhadap indikator moderasi beragama.

Celah penelitian inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini berupaya menghubungkan data empiris mengenai pelaksanaan kegiatan moderasi beragama dengan tujuan normatif kebijakan sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bagaimana kegiatan moderasi beragama dilaksanakan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam mencapai tujuan kebijakan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman alumni terhadap komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Melalui fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan posisi dan kontribusi yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan menempatkan pemahaman alumni sebagai salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan moderasi beragama.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai implementasi kebijakan moderasi beragama dalam meningkatkan pemahaman alumni terhadap indikator moderasi beragama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai implementasi kebijakan moderasi beragama dalam meningkatkan pemahaman alumni terhadap indikator moderasi beragama.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian implementasi kebijakan publik dan moderasi beragama. Hasil penelitian memperkaya literatur mengenai efektivitas kegiatan moderasi beragama, terutama dalam konteks evaluasi pemahaman alumni terhadap indikator moderasi beragama. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang menekuni bidang kebijakan publik, pendidikan agama, serta studi moderasi beragama.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program moderasi beragama. Hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi pengelolaan kegiatan, strategi pengembangan metode sosialisasi, serta pertimbangan bagi Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada capaian pemahaman alumni. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu merancang pendekatan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat multikultural.